

Geneva Internet Platform

DigitalWatch

NEWSLETTER
INDONESIA

Anda menerima banyak potongan informasi terkait kebijakan digital. Kami juga menerimanya. Kami mengurai, membuatnya kontekstual serta menganalisisnya. Lalu kami meringkasnya untuk anda.

TREND KEBIJAKAN DIGITAL BULAN FEBRUARI

1. Seruan untuk norma siber yang baru

Perdebatan tentang norma-norma siber muncul kembali setelah bulan ini ada seruan untuk mengadopsi peraturan baru yang bisa menangani kejahatan dan konflik siber.

Merujuk pada perang antarnegara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengingatkan bahwa serangan siber ke target militer dan infrastruktur penting (*critical infrastructure*) bisa memulai perang baru. Dia mengajak untuk mengurangi dampak dari perang elektronik ke masyarakat umum.

Dalam pidatonya di Universitas Lisbon, Guterres mengatakan belum terlalu jelas bagaimana hukum kemanusiaan internasional, termasuk Konvensi Jenewa, bisa berlaku di perang siber. PBB bisa menjadi platform diskusi beragam pemangku kepentingan untuk membuat peraturan yang bisa menambah unsur lebih manusiawi terhadap konflik siber.

Ketika berpidato di Konferensi Keamanan Munich, Guterres juga mengajukan agar diskusi terkait perundangan hukum internasional menggunakan kompetensi Komisi Pertama Sidang Umum PBB. 'Saya tidak bermaksud agar PBB memimpin

dalam proses ini, tapi saya bisa memastikan PBB akan menjadi platform di mana semua aktor bisa hadir dan mendiskusikan jalan ke depan.'

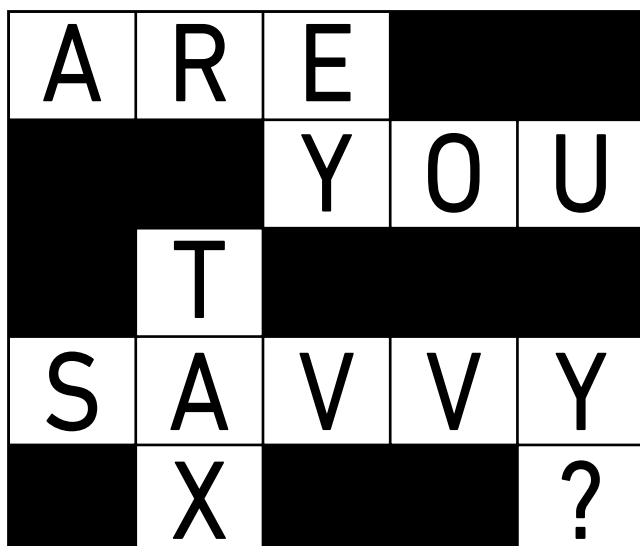
Selama konferensi, beberapa perusahaan teknologi informasi (TI) terkemuka mempresentasikan Piagam Kepercayaan untuk sebuah Dunia Digital yang Aman, menyerukan untuk berbagi kepemilikan keamanan TI antara pemerintah dan industri.

Sementara itu, petinggi pemerintah Rusia dan India juga menyerukan pentingnya adopsi peraturan, norma dan prinsip untuk perilaku negara di dunia siber di bawah koordinasi PBB. Mereka juga meminta Badan PBB untuk Pakar Pemerintah (UNGGE) di Bidang Informasi dan Telekomunikasi dalam Konteks Keamanan Internasional untuk meneruskan proses penyusunan rancangan aturan.

2. Apakah negara dan perusahaan siap untuk GDPR?

Tiga bulan menjelang pelaksanaan Regulasi Perlindungan Data Pribadi (GDPR) Uni Eropa, para ahli sedang menilai kesiapan perusahaan dan negara dalam menghadapi GDPR.

[Continued on page 3](#)



Pajak terhadap ekonomi digital berlanjut dengan debat panas, ketika aturan pajak baru sedang dibuat. Uji pengetahuan Anda tentang isu utama dan perkembangan terkait kebijakan pajak, melalui teka-teki silang kami di halaman 8.

DI EDISI INI

TREN



Dari norma siber ke pajak, kami meringkas tren kebijakan digital utama bulan ini.

[Lebih jauh di halaman 1, 3](#)

BAROMETER



Isu hukum, keamanan, dan teknologi baru mencuat bulan ini. Baca ringkasan perkembangan kami.

[Lebih jauh di halaman 3, 4](#)

YURISDIKSI



Undang-Undang CLOUD yang diusulkan di Amerika Serikat untuk menjelaskan prasyarat akses pemerintah ke data yang disimpan di luar negeri telah memicu reaksi beragam.

[Lebih jauh di halaman 6](#)

MASA DEPAN PEKERJAAN



Laporan baru mengungkap bagaimana otomasi dan ekonomi berbagi dapat mengubah dunia kerja.

[Lebih jauh di halaman 7](#)



Edisi No. 28 Geneva *Digital Watch* newsletter, diterbitkan pada 28 Februari 2018 oleh Geneva Internet Platform (GIP) dan DiploFoundation | Penerjemah ke Bahasa Indonesia: Shita Laksmi, Oni Budipramono, Anton Muhajir | Kontributor: Stephanie Borg Psaila, Stefania Pia Grottola, Jovan Kurbalija, Marco Lotti, Clément Perarnaud, Roxana Radu, Barbara Rosen Jacobson, Sorina Teleanu | Desain oleh Viktor Mijatović, layout oleh Aleksandar Nedeljkov, Diplo's CreativeLab | Selain newsletter, Anda bisa mendapatkan informasi lebih dalam terkait perkembangan kebijakan digital di *GIP Digital Watch Observatory* (<http://dig.watch>) dan ikut diskusi setiap Selasa terakhir setiap bulan di hub lokal negara Anda, atau di GIP (<http://dig.watch/briefings>) | Kirim komentar Anda ke digitalwatch@diplomacy.edu | Unduh versi digital newsletter di <https://dig.watch/newsletter/february2018>

PERKEMBANGAN DIGITAL DI JENEWA

Banyak diskusi kebijakan berlangsung di Jenewa setiap bulan. Kabar terbaru berikut meliputi kegiatan utama bulan ini. Untuk laporan kegiatan, kunjungi seksi Kegiatan Terdahulu [di observatori GIP Digital Watch](#).

Peluncuran Laporan Diplomasi Data

GIP menjadi tuan rumah peluncuran laporan *Diplomasi Data: Memperbarui Diplomasi di Era Big Data*, pada 8 Februari, [yang](#) dipersiapkan oleh DiploFoundation dan ditugaskan oleh Kementerian Luar Negeri Finlandia. Laporan tersebut memetakan peluang utama *big data* dalam berbagai area diplomasi, mengusulkan cara-cara bagi kementerian luar negeri untuk menangkap potensinya, sembari menjelaskan pertimbangan kunci yang harus dipahami agar *big data* dapat berkembang. Peluncuran dihadiri perwakilan diplomatik, organisasi internasional, dan masyarakat sipil di Jenewa.

Komisi Global untuk Pekerjaan Masa Depan: Pertemuan Kedua

Pertemuan kedua Komisi Global untuk Pekerjaan Masa Depan ILO, pada 15-17 Februari, [fokus](#) pada tema utama yang dibahas di laporan tahun 2019, dipersiapkan untuk peringatan 100 tahun ILO. Tugas Komisi Global Tingkat Tinggi adalah bagian dari Inisiatif Pekerjaan Masa Depan ILO [yang](#) diluncurkan oleh Direktur Jenderal ILO, Guy Ryder, pada 2013. Dalam diskusi tersebut, 28 anggota Komisi fokus pada beberapa isu, seperti kerangka ekonomi, peningkatan keahlian, situasi anak muda, dan perlindungan sosial universal. Komisi setuju untuk menemukan peluang-peluang melalui pertemuan teknis, kolaborasi dengan organisasi internasional, dan sesi informasi dengan negara anggota tahun ini. Pertemuan Komisi Global selanjutnya akan dilangsungkan di Jenewa pada 15-17 Mei. [di](#)

Forum WSIS Forum: Pengarahan Final

World Summit on the Information Society Forum (WSIS Forum) 2018 akan berlangsung di Jenewa pada 19-23 Maret [dengan](#) tema 'Memanfaatkan TI untuk Membangun Informasi dan Lembaga Pengetahuan untuk Mencapai Tujuan Pengembangan Berkelanjutan (SDG)'. Proses konsultasi untuk Forum WSIS selesai pada 19 Februari dengan pengarahan untuk persiapan kegiatan, informasi pengajuan lokakarya, dan inovasi dalam program tahun ini. [Lebih](#) dari 250 pengajuan diterima dari berbagai kelompok pemangku kepentingan, terbagi proporsional sebagai berikut: 22% pemerintah, 22% masyarakat sipil, 20% organisasi internasional, 19% sektor swasta, dan 17% sektor pendidikan/akademik. Seperti forum-forum sebelumnya, kegiatan seminggu penuh akan menampilkan sesi tingkat tinggi (terdiri dari sesi kebijakan yang dimoderasi, dialog tingkat tinggi, lokakarya WSIS Prize 2018, sesi interaktif, pertemuan fasilitas, kafe pengetahuan, dll). Perayaan 15 tahun Geneva Plan of Action [menjadi](#) hal penting tahun ini.

Lokakarya Pakar untuk Hak Privasi di Zaman Digital

Lokakarya pakar, dikelola oleh Kantor Komisi Tinggi untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) pada 19-20 Februari [fokus](#) pada identifikasi prinsip, standar, dan praktik terbaik terkait promosi dan perlindungan terhadap hak privasi. Diskusi dua hari terdiri dari enam tema panel berbeda mulai dari kerangka hukum saat ini yang mengatur hak privasi sampai ke peran individu, pemerintah, perusahaan bisnis, dan organisasi swasta dalam mengolah data. Baik panelis maupun partisipan menekankan berulang kali akan pentingnya fokus pada dimensi kolektif akan hak sejalan dengan upaya perlindungan data. Hasil diskusi adalah diperlukannya panduan lebih lanjut untuk menelaah kerangka hukum yang ada terkait perlindungan privasi. Sebagai tambahan untuk mengembangkan prinsip, diperlukan usaha lebih besar untuk memastikan implementasi memadai dari aturan yang ada karena masih kurangnya panduan hukum dan prosedural di tingkat nasional. Lebih jauh, munculnya teknologi berbasis data yang kuat membawa peluang sekaligus tantangan, terutama meningkatnya ketergantungan pada ekstra teritorial dan permintaan untuk akses data yang disimpan di luar negeri. Perlindungan hak anak di ruang digital juga muncul sebagai topik diskusi baru dan penting dalam jangka waktu dekat.

Meja bundar pada kemitraan data di organisasi internasional

Sebagai bagian dari rangkaian GIP's Data Talk, [perwakilan](#) organisasi internasional berkumpul pada 22 Februari untuk mendiskusikan cara terbaik dalam kemitraan berkelanjutan dengan sektor swasta untuk mendapatkan bentuk baru dari data yang dapat memberikan informasi lebih baik tentang aktivitas mereka. Sesi membahas tiga studi kasus kerja sama antara organisasi internasional dan industri Internet, khususnya perusahaan media sosial Facebook dan Twitter, dan raksasa e-dagang Alibaba. Walaupun menjadi jelas bahwa kemitraan seperti ini membutuhkan pendekatan berbeda-beda, beberapa pelajaran umum muncul, seperti pentingnya pembangunan kepercayaan antara organisasi serta perlunya menentukan tujuan yang jelas, peran, dan hasil dari awal.

TREND KEBIJAKAN DIGITAL BULAN FEBRUARI

Sambungan dari halaman 1

Meskipun GDPR langsung berlaku di Uni Eropa (EU) tanpa harus diterjemahkan menjadi hukum nasional, regulasi ini membuka beberapa wilayah yang memungkinkan negara anggota untuk mengatur sesuai yurisdiksi masing-masing. Lebih dari 50 ketentuan di GDPR memberikan keleluasaan itu. [\[1\]](#)

Negara-negara anggota EU sudah mulai menyiapkan rancangan regulasi untuk mengakomodir keleluasaan ini. Menurut survei yang saat ini sedang berlangsung, hanya seperlima anggota EU yang masih harus mengenalkan rancangan perundangan ini. [\[2\]](#)

Kesiapan menghadapi GDPR lebih berat untuk perusahaan. Survei Forrester Research menemukan bahwa setengah dari perusahaan Eropa siap atau menuju siap. [\[3\]](#) Survei oleh EY menemukan lebih sedikit perusahaan di negara lain yang siap melaksanakan GDPR: 27% perusahaan yang disurvei di Afrika dan Timur Tengah, 13% di Amerika dan 12% di Asia Pasifik. [\[4\]](#)

3. Karena banyak tekanan, muncul detail baru terkait proposal reformasi pajak di EU

Perusahaan Internet menunggu dengan tidak sabar reformasi pajak yang dijanjikan EU akan diajukan pada akhir Maret.

Bulan ini, beberapa detail baru muncul. Seperti diungkap Bloomberg, Komisi Eropa merencanakan dua bentuk baru perpajakan: (a) pajak sementara untuk keuntungan iklan dari perusahaan Internet raksasa seperti Facebook dan Google dianggap sebagai solusi yang tepat, dan (b) pajak terpisah yang ditujukan ke platform daring seperti Amazon, Ebay dan Airbnb.

Proposal ini juga mengenalkan konsep pendirian permanen virtual. [\[5\]](#) Dalam surat yang dikirimkan ke Menteri Keuangan Amerika Serikat, perusahaan teknologi mengungkapkan keprihatinan terkait iklim bisnis global ini dan meminta Amerika Serikat untuk ikut serta secara langsung dan sangat aktif dalam debat itu. [\[6\]](#)

Saat ini, negara anggota EU terbagi. Ada yang sepakat atas reformasi pajak, seperti Perancis dan Jerman. Ada pula negara kecil seperti Irlandia yang percaya bahwa EU harus menunggu proposal perpajakan dari OECD dan menganggap bahwa reformasi pajak harus terjadi di tingkat global.

Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) saat ini sedang mengkaji beberapa pilihan untuk menangani tantangan perpajakan akibat ekonomi digital. Namun, beberapa negara EU menyatakan bahwa proses pengkajian ini terlalu lama dan meminta EU untuk berjalan sendiri. Kedua proposal baik EU ataupun laporan sementara OECD akan diterbitkan dalam beberapa minggu ke depan.

4. Sistem komputer dan situs dieksploitasi untuk menambang mata uang kripto

Tren terakhir kejahatan siber yang menghantam Internet adalah penggunaan sistem dan situs untuk melakukan eksploitasi mata uang kripto.

Para peneliti menemukan penambangan mata uang kripto dalam program itu terjadi di sistem awan Tesla. [\[7\]](#) dan ribuan situs di seluruh dunia. [\[8\]](#) Para ilmuwan yang bekerja di fasilitas nuklir

Rusia, telah ditangkap dengan tuduhan menggunakan komputer di tempat kerja untuk menambang mata uang kripto. [\[9\]](#)

Apa yang disebut dengan pembajakan kripto (*cryptojacking*) menjadi tren terbaru di kejahatan siber. Pengguna diajak membuka sebuah tautan atau mengunjungi situs yang sudah terinfeksi kemudian program secara otomatis akan berjalan. [\[10\]](#) Program yang menyadap komputer pengguna akan melakukan proses akuntansi mata uang tersebut dan mendapatkan bayaran. Penambangan mata uang kripto sendiri merupakan cara sah untuk mendapatkan mata uang kripto, tetapi mengeksploitasi komputer pengguna tanpa persetujuan pengguna adalah kejahatan.

Jika pemerintahan khawatir terhadap penggunaan mata uang kripto untuk tujuan jahat, praktik t akan menambah kekhawatiran tersebut.

5. Kejahatan seksual daring terhadap anak meningkat

Hari Internet Aman pada 6 Februari tahun ini berperan untuk menggarisbawahi meningkatnya kejahatan terhadap anak dan perlunya kerja sama lebih kuat antar-pemangku kepentingan untuk melindungi anak-anak di dunia daring. UNICEF memperkirakan satu orang anak masuk dunia daring pertama kali setiap setengah detik, setiap hari. Organisasi tersebut mengatakan bahwa anak-anak tertarik memanfaatkan kesempatan yang ditawarkan Internet, tetapi juga menghadapi risiko berbahaya. [\[11\]](#)

Kejahatan seksual daring terhadap anak meningkat, ungkap aliansi WeProtect. Perdagangan seks siber telah menjadi 'bentuk brutal dari perbudakan zaman modern'. [\[12\]](#) Aliansi tersebut percaya bahwa pihak berwenang harus memiliki akses dengan proses yang benar terhadap data untuk melindungi anak-anak, untuk memastikan investigasi efektif, dan mendukung penuntutan terhadap pelanggar.

Council of Europe's Lanzarote Committee, yang memonitor implementasi Konvensi pada Perlindungan Anak terhadap Eksploitasi dan Kejahatan Seksual, telah merekomendasikan negara-negara secara spesifik mengatasi masalah kejahatan seksual di lingkaran kepercayaan melalui materi khusus di sekolah. [\[13\]](#)



Sebuah tren baru mulai muncul di kejahatan siber, *cryptojacking*. Bulan ini terdapat situs-situs web dan sistem yang dieksploitasi untuk menambang mata uang kripto. Hal ini termasuk super komputer Rusia untuk penelitian nuklir, sistem awan Tesla, dan ribuan situs web di seluruh dunia.

KEBIJAKAN DIGITAL: PERKEMBANGAN DI FEBRUARI

Barometer bulanan mengikuti perkembangan kebijakan publik untuk isu spesifik Tata Kelola Internet dalam debat kebijakan publik dan menampilkan tren utama dengan membandingkan isu setiap bulan. Barometer ini menunjukkan munculnya isu spesifik di Tata Kelola Internet dibandingkan bulan sebelumnya. [Baca perkembangan masing-masing isu di sini.](#)

Arsitektur Tata Kelola Internet Global



Relevansi menurun

Internet Society meluncurkan Proyek Tata Kelola Kolaboratif untuk 'memperluas pengetahuan global dan pemanfaatan proses tata kelola kolaboratif untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan norma'.

Beberapa perusahaan global, termasuk Airbus, IBM, Siemens, dan Deutsche Telekom, menandatangani sebuah Piagam Kepercayaan untuk sebuah Dunia Digital yang Aman.

Pembangunan Berkelanjutan



Relevansi tetap

FAO dan Telefonica telah menyetujui kesepakatan untuk bekerja sama meningkatkan penggunaan teknologi digital seperti Internet of Things (IoT) dan *big data* untuk pembangunan pertanian, keamanan pangan, dan nutrisi. Grup Bank Dunia dan GSMA juga mengumumkan kemitraan untuk pemanfaatan *big data* dari IoT untuk pertumbuhan dan pembangunan.

Berbicara di Konferensi Keamanan Munich, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyerukan untuk 'sebuah diskusi serius tentang kerangka hukum internasional di mana perang siber berlangsung'.

Keamanan



Relevansi meningkat

India dan Rusia bersepakat untuk memperluas kerja sama di bidang keamanan siber. Mereka juga menyerukan agar norma untuk mengatur tingkah laku negara di ruang siber dan untuk berlanjutnya UN GGE. Inggris dan Amerika Serikat telah secara terbuka menuduh Rusia ada di balik serangan ransomware NotPetya pada Juni 2017. Rusia menolak tuduhan tersebut.

Penilaian Ancaman Global dari Komunitas Intelijen AS yang dipresentasikan oleh Direktur Intelijen Nasional AS, melihat ancaman siber sebagai satu dari ancaman global tertinggi di 2018.

Super komputer Rusia untuk penelitian nuklir, sistem awan Tesla, dan ribuan situs web seluruh dunia telah dieksploitasi untuk menambang mata uang kripto.

Lebih dari lima tahun setelah Amazon dikenakan pajak hampir €200 juta oleh otoritas pajak Perancis, kedua belah pihak telah mencapai sebuah 'persetujuan penyelesaian komprehensif' untuk jumlah yang tidak disebutkan. Komisi Eropa akan mempresentasikan rencana reformasi pajak bagi raksasa Internet pada akhir Maret. Menurut Komisioner Hubungan Ekonomi Uni Eropa, Pierre Moscovici, 'pajak digital bukan lagi sebuah pertanyaan "jika", tapi lebih ke "bagaimana" akan dilakukan'.

E-dagang dan ekonomi Internet



Relevansi meningkat

Dalam kasus yang diangkat oleh supir Uber, pengadilan tenaga kerja di Paris, Perancis, memutuskan bahwa 'bisnis Uber adalah intermediasi bukan transportasi', dan bahwa supir Uber adalah wiraswastawan. Di Maroko, Uber menghentikan aktivitasnya karena ketidakpastian regulasi. Menteri Luar Negeri AS mengusulkan dibentuknya Biro untuk Ruang Siber dan Ekonomi Digital, 'untuk memformulasikan dan mengkoordinasikan pendekatan strategis untuk mengatasi tantangan nyata dan berkembang keamanan siber dan ekonomi digital'.

Komisi Eropa meluncurkan Pengamatan dan Forum *Blockchain* Uni Eropa, untuk membantu Uni Eropa tetap terdepan di perkembangan *blockchain*. Pemerintah India mengumumkan tidak mengakui *bitcoin* sebagai alat pembayaran yang sah, dan akan merumuskan regulasi menyeluruh terhadap industri mata uang kripto. Manajer Umum dari Bank Penyelesaian Internasional memperingatkan bahwa mata uang kripto dapat menjadi ancaman terhadap stabilitas finansial. Otoritas Pengawas Pasar Finansial Swiss menerbitkan sekumpulan Panduan untuk Penawaran Koin Perdana. Venezuela meluncurkan mata uang kripto berdaulat pertama dunia, petro.

Hak digital



Relevansi meningkat

Article 29 Working Party mengeluarkan revisi panduan tentang implementasi dari EU GDPR. Komisi Eropa telah mengirimkan surat kedua kepada Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), menyatakan keprihatinan terhadap model proposal untuk memastikan kepatuhan antara kebijakan WHOIS dan GDPR dari organisasi tersebut.

Pengadilan Belgia memutuskan bahwa Facebook melanggar hukum privasi dengan melacak pengguna pada situs pihak ketiga. Facebook berniat untuk naik banding atas keputusan tersebut.

Yurisdiksi dan isu hukum



Relevansi meningkat

Undang-undang untuk Klarifikasi Penggunaan Data di Luar Negeri yang Mematuhi Hukum (CLOUD Act) yang diperkenalkan di Kongres AS bertujuan untuk mengklarifikasi kondisi di mana otoritas AS dapat mengakses data yang disimpan perusahaan AS di luar negeri. Undang-undang tersebut diterima oleh industri Internet, dan disikapi dengan tutup mulut oleh organisasi hak asasi manusia.

Hasil pemungutan suara Parlemen Eropa berpihak pada regulasi baru geoblocking, bertujuan untuk memfasilitasi akses layanan online lintas-batas, di dalam Uni Eropa, menghindari batasan atau diskriminasi konten di beberapa lokasi. Pengecualian untuk materi berhak cipta telah menarik kritik dari kelompok hak konsumen.

Infrastruktur



Relevansi tetap

ICANN memutuskan untuk tidak mendelegasikan top-level domain umum .corp, .home, dan .mail karena menimbang adanya tumpang tindih dengan label penamaan yang digunakan di jaringan privat.

Menteri luar negeri negara-negara ASEAN menyatakan dukungan terhadap sebuah proposal untuk membangun sebuah Jaringan Kota Pintar ASEAN.

Otoritas Regulator Telekom India merekomendasikan untuk mengadopsi kebijakan untuk mendorong pengembangan jaringan yang khusus diterapkan untuk IoT.

Netralitas jaringan



Relevansi meningkat

Negara-negara bagian di Amerika Serikat mengambil tindakan untuk menjaga netralitas jaringan setelah Federal Communications Commission (FCC) mengadopsi *Restoring Internet Freedom Order* Desember lalu. Asosiasi Internet menyatakan dukungan untuk sebuah resolusi terhadap Kajian Undang-undang Senat Kongres, yang diajukan untuk membatalkan aturan FCC. Jaksa Agung di 22 negara bagian dan Washington DC mendaftarkan ulang tuntutan hukum yang menentang aturan tersebut.

Otoritas Belanda untuk Konsumen dan Pasar menolak permintaan untuk menindak dugaan pelanggaran T-Mobile atas aturan netralitas jaringan melalui tawaran *streaming* musik *zero-rated*.

Dalam sebuah laporan di *Open Internet and Devices*, regulator Perancis ARCEP mencatat bahwa aturan netralitas sebaiknya juga mencakup perangkat, tidak hanya jaringan.

Teknologi baru (IoT, AI, dll.)



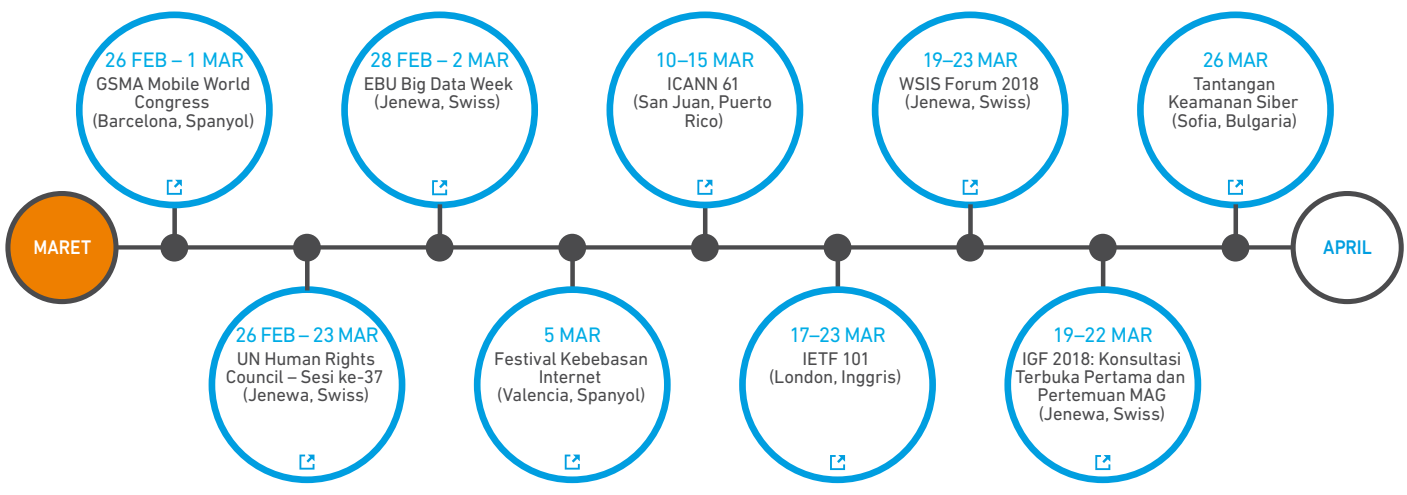
Relevansi meningkat

India mendirikan institut kecerdasan buatan pertamanya, dan telah membuat empat komite yang bertugas menyiapkan peta jalan nasional untuk kecerdasan buatan.

Jerman tidak memiliki niat untuk membeli sistem senjata otonom.

Tinjauan ancaman global dari Komunitas Intelijen AS menyatakan kecerdasan buatan, IoT dan *big data* sebagai beberapa area yang berpotensi menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional. Sebuah laporan dari organisasi akademik dan masyarakat sipil menguraikan ancaman keamanan yang mungkin dihasilkan dari penggunaan sistem kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Laporan juga memberikan rekomendasi untuk membuat perkiraan, pencegahan dan pengurangan ancaman dengan lebih baik.

AKAN DATANG DI BULAN MARET



Untuk informasi acara yang akan datang, kunjungi <http://dig.watch/events>

UNDANG-UNDANG CLOUD DI AMERIKA: DAMPAK DAN REAKSI

Di Amerika, Undang-undang terkait Klarifikasi Hukum Penggunaan Data di Luar Amerika (CLOUD Act) sedang mengajukan kerangka baru otorisasi akses data yang disimpan di luar negeri. Hal ini akan mengubah Undang-undang Penyimpanan Komunikasi (SCA). Artikel ini mengamati bagian paling menonjol dari Undang-undang (UU) ini serta akibatnya.

RUU ini dimulai Kongres Amerika pada 6 Februari 2018, menyoroti data elektronik yang menjadi bagian penting investigasi kejahatan serta ancaman, yang disimpan perusahaan. Saat ini, pihak berwenang mengatakan mereka tidak bisa mengakses data yang disimpan di luar Amerika secara efektif. Selain itu, perusahaan juga menghadapi banyak kewajiban yang saling bertabrakan di banyak yurisdiksi. RUU itu bertujuan 'memperbaiki penegakan hukum untuk mengakses data lintas batas'.

Pemeliharaan dan pengungkapan komunikasi dan rekaman

Salah satu bagian penting dari RUU itu memperkenalkan satu hal baru di Bab 121 dari SCA:

Penyedia komunikasi layanan komunikasi elektronik atau layanan komputerasi jarak jauh harus patuh pada kewajiban pada bab ini untuk memelihara, mencadangkan, atau membuka isi komunikasi elektronik ataupun kabel dan semua bentuk rekaman atau informasi lain yang berisi informasi konsumen atau pelanggan dalam area yang dimiliki, dalam perwalian, atau kontrol penyedia, tidak peduli bahwa komunikasi, rekaman, atau informasi lainnya itu berada di dalam atau di luar Amerika Serikat.

Bab 121 mengatur bagaimana dan sampai sejauh mana otoritas publik bisa meminta penyedia (*provider*) untuk membuka data dan komunikasi yang disimpan secara daring. Amandemen itu juga memberikan wewenang pada otoritas pemerintah untuk menekan perusahaan Amerika agar membuka informasi, kendati disimpan di negara lain.

Jika disetujui, rancangan ini akan dilihat sebagai upaya melaksanakan yurisdiksi luar batas, meskipun di bagian lain masih sesuai dengan ide awal bahwa negara bisa mengatur isu yang memiliki dampak domestik. Bagaimanapun, rancangan ini memberikan 'hak berdasar undang-undang' pada penyedia jasa untuk memberatkan pemanggilan atau proses hukum lainnya dan membangun komite internasional yang bisa membatasi jangkauan mereka.

Terakhir, UU CLOUD ini akan memberikan hak pada penyedia jasa memberikan notifikasi kepada pemerintah asing apabila mereka mendapatkan permintaan data secara sah dari Amerika terkait warga negara asing, dengan syarat pemerintah asing ini telah masuk dalam kesepakatan dengan Pemerintah Amerika.

Dukungan dan kritik

Reaksi beragam muncul atas rancangan ini. Pihak yang menyepakati adalah perusahaan teknologi; sementara organisasi hak asasi manusia dan Ornop sangat menolak. Perusahaan teknologi termasuk Apple, Facebook, Google, Microsoft dan Oath telah menandatangani surat dukungan, mengatakan bahwa, 'rancangan ini merefleksikan munculnya kesepakatan bersama atas pentingnya melindungi pengguna Internet di seluruh dunia dan memberikan solusi logis untuk menata akses data lintas batas.'

Electronic Frontier Foundation (EFF) mengungkap bahwa rancangan ini memberikan 'penambahan keleluasaan terhadap polisi untuk bisa menyadap data yang lintas batas.' Menurut

EFF, rancangan ini akan memberikan akses kepada agen penegak hukum Amerika untuk mengakses konten terkait individu tertentu tak peduli di mana mereka tinggal atau di mana informasi disimpan.

Rancangan ini juga memberi kemungkinan pada Presiden Amerika untuk memasuki 'kesepakatan eksekutif' dengan pemerintahan asing dan memberikan akses data pengguna kepada mereka tanpa peduli kebijakan privasi di negara terkait. Ini juga akan mengarah pada gagalnya Pakta Bersama Asistensi Hukum (MLATs), sistem yang akan lebih baik menjamin perlindungan data.

Kelompok privasi lain seperti Open Technology Institute (OTI) dan Access Now juga tidak sepatutnya dengan rancangan itu. Mereka mengatakan masih kurangnya perlindungan yang memadai terhadap hak asasi manusia, privasi dan kemerdekaan sipil.

UU CLOUD dalam konteks: Kasus Microsoft di Irlandia

Undang-undang CLOUD ini harus dimaknai dalam kasus hukum sebelumnya terkait isu penggunaan hukum Amerika secara ekstrateritorial.

Kasus Microsoft di Irlandia dimulai ketika Departemen Hukum Amerika mengeluarkan surat pemanggilan kepada Microsoft, meminta mereka memberikan detail dan isi sebuah surat elektronik (e-mail) terkait terduga penjual obat terlarang yang disimpan di Irlandia. Awalnya, Microsoft tidak mau menuruti karena informasi yang diminta berada di pusat data Microsoft di Dublin. Microsoft menyarankan agar otoritas Amerika menggunakan jalur internasional dengan pihak berwenang Irlandia untuk meminta informasi tersebut. Hakim Federal awalnya tetap dengan pemanggilan tersebut tetapi dibatalkan oleh Second Circuit (Pengadilan Tinggi) dengan mengatakan bahwa 'eksekusi atas pemanggilan itu melanggar pelaksanaan teritorial atas UU tersebut'. Otoritas Amerika, yang menganggap permintaan itu sah karena memiliki jangkauan internasional, kemudian mengajukan banding keputusan Second Circuit itu ke Mahkamah Agung.

Keputusan atas Mahkamah Agung akan berdampak besar terhadap aturan hukum Amerika terkait permintaan data, dan semua yang terkait dengan UU CLOUD.

UU CLOUD dan GDPR

Kendati UU CLOUD dan GDPR pada dasarnya berbeda dalam tujuan dan cakupan, UU CLOUD mungkin akan berkonflik dengan beberapa pasal di GDPR. Para ahli percaya bahwa GDPR pasal 48 membahas aktivitas yang dilakukan negara asing, termasuk Amerika, dalam investigasi dan melarang adanya transfer atau pembukaan data pribadi kecuali patuh pada MLAT atau perjanjian internasional lainnya. Contoh ini menunjukkan dinamika terkait privasi dan permintaan data antara Amerika dengan Eropa.

UU CLOUD berpotensi menjadi sumber diskusi di tingkat nasional dan internasional. UU itu berisi pendapat kuat pemerintah Amerika dan juga merefleksikan usangnya kerangka hukum saat ini serta tantangan regulasi internasional di era digital.

KERJA MASA DEPAN: BERSIAP UNTUK OTOMATISASI DAN EKONOMI GIG

Perkembangan dunia yang semakin digital, ekonomi berbagi dan beragam perkembangan dalam otomatisasi dan AI membawa perubahan dalam dunia kerja. Beberapa laporan dan hasil studi yang dikeluarkan bulan ini membuka tabir bagaimana perubahan akan terlihat, bagaimana pegawai dan perusahaan melihatnya dan apa yang bisa dilakukan oleh pemangku kepentingan untuk bersiap lebih baik.

Inggris mengadopsi perundangan terkait 'ekonomi gig'

Apa yang disebut sebagai ekonomi *gig* (atau ekonomi berbagi) membawa banyak pekerjaan baru, tetapi juga dampak terkait hak dan proteksi atas orang-orang yang bekerja di model bisnis baru ini. Banyak pemerintah mulai mendalami dampak ini. Contoh terbaru datang dari Inggris.

Pada Juli 2017, sebuah laporan yang dibuat Pemerintah Inggris mengatakan bahwa ekonomi *gig* membawa manfaat kepada pekerja (seperti keleluasaan dan kontrol bagaimana mereka bekerja), tetapi kerangka hukum ketenagakerjaannya perlu dibuat agar lebih melindungi. Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, rencana Good Work yang dikeluarkan bulan ini mengusulkan beberapa ukuran untuk memastikan adanya keseimbangan antara melindungi peluang yang hadir atas 'metode kerja di atas platform/ platform-based', dan memastikan adanya keadilan antara 'mereka yang bekerja di platform dan mereka yang berkompetisi'. Di antaranya adalah pengenalan atas konsep 'kontraktor tergantung' untuk pekerja di ekonomi *gig* dan klarifikasi hukum serta alat praktis yang bisa membedakan antara pegawai dan 'kontraktor tergantung'.

Pengetahuan baru terkait dampak dari otomatisasi atas pekerjaan

Keprihatinan terhadap pekerjaan masa depan juga datang dari perkembangan teknologi yang sangat pesat di otomatisasi dan AI. Beberapa pihak khawatir pekerjaan yang diotomatisasi akan menurunkan jumlah pekerjaan. Beberapa pihak lain berargumen bahwa perkembangan teknologi akan membawa pekerjaan baru dan mengganti apa yang telah hilang tanpa secara signifikan mengurangi jumlahnya.

Kajian PriewaterhouseCoopers melihat ada tiga gelombang otomatisasi 20 tahun ke depan:

- Gelombang I -- algoritma (sampai awal tahun 2020an). Otomatisasi atas kerja komputasi yang sederhana, gelombang ini akan mengakibatkan perpindahan pekerjaan yang kecil, sekitar 3%.
- Gelombang II -- augmentasi (sampai akhir tahun 2020an). Interaksi dinamik dengan teknologi untuk kerja administrasi dan pengambilan keputusan akan berdampak pada lebih banyak pekerjaan.
- Gelombang III -- otonom (sampai pertengahan 2030an). Sampai 30% pekerjaan akan otomatis.

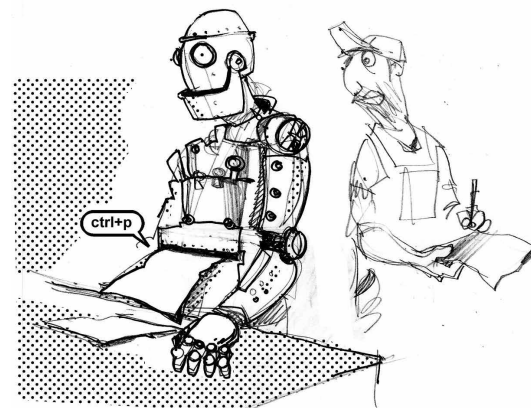
Dalam tiga gelombang tersebut, otomatisasi pekerjaan diharapkan akan berbeda sangat signifikan untuk masing-masing sektor industri, negara dan tipe pekerjaan. Secara umum, hanya sekitar 20-20% pekerjaan di Asia Timur dan ekonomi Nordic yang akan terotomatisasi di pertengahan 2030an, sementara persentase naik lebih dari 40% di negara-negara Eropa Timur. Kendati transportasi, pabrik dan kerja konstruksi akan mengalami otomatisasi sekitar 40%-50% di pertengahan 2030an, kesehatan masyarakat, kerja sosial dan edukasi tidaklah terlalu terkena dampak otomatisasi. Pekerja dengan kualitas pendidikan tinggi akan menghadapi potensi pengurangan potensi pekerjaan karena otomatisasi. Di sisi lain perempuan akan lebih terdampak oleh otomatisasi ketimbang laki-laki di dua gelombang pertama.

Laporan ini menyarankan beberapa upaya untuk 'membantu orang beradaptasi terhadap teknologi baru': pendidikan dan pelatihan ulang,

mendukung kreasi pekerjaan baru, melindungi hak pekerja dan memperkuat jaring pengaman sosial. Kendati banyak kekhawatiran terkait hilangnya pekerjaan baru karena perkembangan teknologi, pemerintah dan perusahaan tetap harus mendukung dan berinvestasi dalam teknologi-teknologi baru ini. Jika tidak, mereka akan kehilangan kesempatan untuk menjadi yang terdepan dalam perkembangan teknologi, dengan konsekuensi jangka panjang yang negatif di sektor sosial dan ekonomi.

EMPLOYMENT BUREAU

Please fill the form.



DIPLO

Apa yang dipikirkan oleh pemberi kerja dan pekerja soal AI di lingkungan kerja?

Kendati banyak hasil studi fokus pada prediksi dampak otomatisasi dan AI di pekerjaan, pandangan bagaimana hal ini dilihat oleh perusahaan dan pekerjaan tidaklah banyak. Dua hasil studi yang dipublikasikan bulan ini membuka tabir tersebut.

Menurut survei Willis Towers Watson di 38 negara, lebih dari setengah pekerja yang disurvei (57%) menganggap tujuan utama dari otomatisasi adalah memperbaiki kinerja dan produktivitas manusia (bukan menggantikan manusia untuk menghemat). Tetapi 38% lainnya mengatakan mereka belum siap untuk identifikasi keahlian baru terutama untuk yang pekerjaannya terkena dampak otomatisasi.

Para pekerja terlihat lebih optimis, walaupun hati-hati, atas dampak AI ke pekerjaan. Survei oleh Workforce Institute and Coleman Parkes Research di delapan negara menemukan hanya 34% dari pekerja yang prihatin terhadap keberadaan AI untuk menggantikan pekerjaan mereka, dua pertiga lainnya akan lebih nyaman bila perusahaan lebih transparan dalam rencana mereka menggunakan AI di pekerjaan.

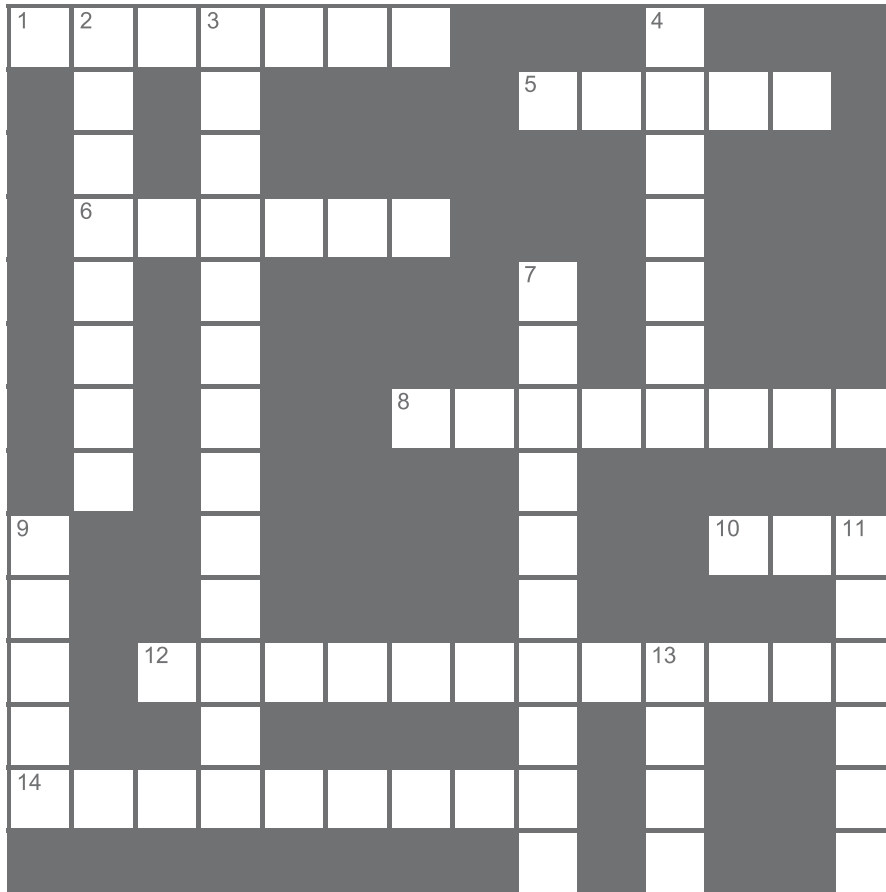
Apa selanjutnya?

Sungguh jelas bahwa digitalisasi, otomatisasi dan AI akan berdampak pada dunia pekerjaan. Lalu langkah apa yang perlu diambil, oleh siapa untuk memastikan masa depan pekerjaan yang kita semua inginkan termasuk bagaimana mengambil manfaat darinya? Global Commission on the Future of Work, yang dibentuk oleh ILO, adalah salah satu tempat di mana pertanyaan tersebut dieksplorasi. Besar kemungkinan, isu-isu ini akan tetap menjadi fokus di tahun-tahun ke depan.

UJI PENGETAHUAN ANDA PADA ISU PAJAK INTERNET

Pengenaan pajak kepada perusahaan Internet menjadi salah satu debat hangat saat ini. Usulan Komisi Eropa dan OECD, yang diperkirakan datang dalam minggu-minggu ke depan, dan diperkenalkannya pajak baru di negara-negara lain di seluruh dunia adalah dua dari tanda bahwa pajak untuk ekonomi digital akan tetap menjadi agenda besar kebijakan publik tahun ini.

Uji pengetahuan Anda pada isu utama dan kabar terbaru terkait pajak. Konsultasikan ke ruang khusus pada observatori *Digital Watch* kami untuk mendapatkan jawaban dari sebagian besar petunjuk teka-teki.



Mendatar

- 1 Di bawah konsep pendirian permanen _____ yang diusulkan oleh beberapa negara Uni Eropa, perusahaan Internet akan dikenai pajak di mana penghasilan diciptakan, bukan di mana perusahaan didaftarkan. (7)
- 5 Kesepakatan 'Double _____' dan 'Dutch Sandwich' adalah beberapa pendekatan yang digunakan perusahaan Internet untuk memindahkan penghasilan ke yurisdiksi berbeda. (5)
- 6 Perusahaan Internet yang bulan ini mencapai kesepakatan penyelesaian dengan Perancis setelah menerima tagihan pajak hampir €200 juta. (6)
- 8 Negara Eropa yang mempresentasikan salah satu laporan komprehensif pertama pada perpajakan Internet, di tahun 2013. (8)
- 10 Akronim dari organisasi perdagangan antarnegara, yang pada tahun 1998 memperkenalkan sebuah moratorium yang menyatakan semua transmisi elektronik bebas bea pajak antarnegara anggotanya. (3)
- 12 Badan hukum tinggi di Amerika Serikat yang meninjau ulang aturan pajak dari tahun 1992 yang memungkinkan Internet menjadi 'zona bebas pajak'. (7,5)
- 14 Negara Asia yang baru-baru ini mengumumkan pajak barang dan jasa untuk layanan digital impor mulai Januari 2020. (9)

Menurun

- 2 Negara yang terlibat dalam aturan 'pajak kekasih' yang terkenal di tahun 2016; Komisi Eropa memerintahkan Apple untuk membayar pajak ke negara ini sejumlah €13 milyar. (8)
- 3 Pajak penjualan, pajak pertambahan nilai, dan pajak barang dan jasa adalah contoh dari apa yang disebut pemajakan _____. (5,8)
- 4 Otoritas pajak khawatir bahwa _____ dan mata uang virtual lain lebih banyak dimanfaatkan untuk pencucian uang dan penghindaran pajak. (7)
- 7 Strategi yang digunakan perusahaan untuk memindahkan keuntungan ke yurisdiksi yang rendah pajak atau bebas pajak disebut _____ keuntungan. (10)
- 9 Pada pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia di Januari 2018, filantropis George _____ mengkritik perusahaan TI besar akan 'tingkah laku monopoli' mereka dan menyatakan bahwa pajak regulasi dan tekanan pajak dapat mendobrak dominasi global mereka. (5)
- 11 Pada tahun 1998, Prinsip _____ diadopsi oleh OECD yang menyatakan bahwa pajak terhadap e-dagang harus didasarkan pada prinsip yang sama dengan aktivitas komersial tradisional. (6)
- 13 Akronim dari organisasi antarnegara yang diharapkan akan menyajikan laporan sementara atas isu pajak dalam ekonomi digital dalam beberapa minggu ke depan. (4) principes que la taxation des activités commerciales traditionnelles. (6)

Mendatar: 1 Virtual, 5 Irish, 6 Amazon, 8 Perancis, 10 WTO, 12 Supreme Court, 14 Singapura.
Menurun: 2 Irlandia, 3 Tidak langsung, 4 Bitcoin, 7 Pergi, 9 Soros, 11 Ottawa, 13 OECD.

Langganan GIP Digital Watch terkini di <http://dig.watch>

Pindai kode untuk mengunduh versi digital newsletter